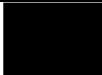
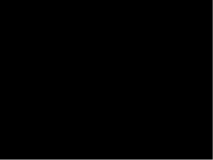


REKAPITULASI DUGAAN PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2017

KABUPATEN CILACAP

No	Peristiwa yang diduga Pelanggaran	Nomor Registrasi		Nama Pengawas/ Pelapor		Ketentuan Pasal yang diduga Pelanggaran	Tindakan Pengawas	Status Pengawasan	Keterangan
		Temuan	Laporan	Pengawas	Pelapor				
1	Mutasi Pejabat Oleh Bupati 		001/LP/Pilkad a.07/XI/2016			71 ayat 2 UU no 10 tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> Panwas telah memiliki Sk Bupati cilacap baik terkait dengan penggantian pejabat maupun SK pencabutan SKtsb. Konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jateng Mempelajari SE Bawaslu RI no.0646/K.BAWASLU/P M.06.00/X/2016 	Dihentikan Karena tidak termasuk dalam Ketentuan Pasal 71 UU 10/2016	
2	Kampanye ditempat Pendidikan oleh 		002/LP/Pilkad a.07/XI/2016			Pasal 69 huruf i UU 8 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> Klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi Klarifikasi terhadap Pelapor Rapat dengan Gakkumdu 	Panwas dan Gakkumdu menilai bahwa ada terbukti ada pelanggaran Kampanye, Selanjutnya merekomendasikan pada KPU Kab. Cilacap Agar Memberi Peringatan tertulis Kepada yang bersangkutan.	sanksi sesuai ketentuan Pasal 72 ayat 2 Huruf a UU 1/ 2015
3	Mobilisasi PNS Mendukung Paslon No urut 2		01/LP/Pilkada .07-Cipari/XI/2016			Pasal 71 ayat 1 UU no 10 tahun 2016 Pasal 4 PP no 53 tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> Mendampingi Panwas cqam Cipari Panwas cqam agar mengklarifikasi pelapor, saksi dan terlapor 	Dihentikan karena tidak dapat dibuktikan	Para saksi Membantah adanya dugaan Pelanggaran
4	Penyalahgunaan Wewenang Oleh		003/LP/Pilkad a.07/XI2016				<ul style="list-style-type: none"> Klarifikasi terhadap pelapor dan saksi 		

	Ketua TP PKK Kab. Cilacap						<ul style="list-style-type: none"> Klarifikasi terhadap terlapor 	Dihentikan karena tidak dapat membuktikan oleh pelapor dan saksi bahwa terlapor melakukan menyalahgunakan wewenang	
5	Satpol PP IkutMengawal Calon Bupati Nomor Urut 2		004/LP/Pilkad a.07/XI2016				<ul style="list-style-type: none"> Mencermati berkas laporan 	Dihentikan Karena tidak memenuhi syarat material	tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa yang terjadi
6	Kades Karang Kemiri Kec. Jeruklegi Ikut Kampanye Paslon No urut 3	001/TM/Pilkad a.07/XII2016				Pasal 29 huruf J UU no 6 tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> Klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi Klarifikasi terhadap Pelapor Rapat dengan Gakkumdu 	Panwas dan Gakkumdu menilai bahwa terbukti ada pelanggaran oleh kades yang ikut berkampanye, selanjutnya merekomendasikan kepada bupati Cilacap	Sanksi tertuang dalam ketentuan pasal 30 ayat 1 UU 6/2014
7	PNS Dikdispora di depan kantor berfoto dengan 2 jari		005/LP/Pilkad a.07XII/2016				<ul style="list-style-type: none"> Mencermati berkas laporan 	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materil	tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa yang terjadi
8	Cabup No.2 Melakukan Money Politic dan Kampanye difasilitas pemerintah		006/LP/Pilkad a.07XII/2016			Pasal 73 ayat 1 UU no 10 tahun 2016 dan pasal 6 huruf H UU No 1 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> Klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi Klarifikasi terhadap Pelapor Rapat dengan Gakkumdu 	Panwas dan Gakkumdu menilai bahwa dugaan Money Politic dan menggunakan fasilitas pemerintah tidak terbukti, namun ditemukan dan	KPU Ka. Cilacap telah memberi sanksi Kepada Cabuo No. 2 sesuai rekomendasi Panwaskab Cilacap

								terbukti ada pelanggaran kampanye, selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kab. Cilacap agar memberi sanksi kepada yang bersangkutan.	
9	Orang a.n [REDACTED] dan [REDACTED] diduga melakukan Money politic		007/LP/Pilkad a.07/II/2017		[REDACTED]	Pasal 73 ayat 4 Huruf C UU nomor 10 tahun 1016	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima Laporan Bersama Gakkumdu • Mengundang Pelapor, Saksi danterlapor untuk Klarifikasi • Koordinasi dengan Gakkumdu guna mengambil Keputusan 	Panwas dan Gakkumdu menilai bahwa dugaan Money Politic tidak terbukti.	